



ISSN: 2597-4726

AQLI
Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah



Jurnal Riset Sains Manajemen

Volume 1 , Nomor 2, 2017

Analisis kebijakan program penanggulangan kemiskinan: Implementasi manajemen pemerintahan Kota Tanjung Balai

Khairul Anwar Pulungan, Riva Ubar Harahap, Saprial Manurung

Hal. 115-128

DOI: 10.5281/zenodo.1069779

Informasi Artikel

Cara sitasi

Pulungan, K. A., Harahap, R. U., Manurung, S. (2017). Analisis kebijakan program penanggulangan kemiskinan: Implementasi manajemen pemerintahan Kota Tanjung Balai. *Jurnal Riset Sains Manajemen*, 1(2), 115-128. Retrieved from <http://ejurnal.id/index.php/jsm/article/view/101>

Atau,

Pulungan, K. A., Harahap, R. U., Manurung, S. (2017). Analisis kebijakan program penanggulangan kemiskinan: Implementasi manajemen pemerintahan Kota Tanjung Balai. *Jurnal Riset Sains Manajemen*, 1(2), 115-128. DOI: 10.5281/zenodo.1069779

Tautan permanen ke dokumen ini

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1069779>



© LPPI AQLI
Jurnal Riset
Sains Manajemen
Vol. 1 No.2
Hlm. 115-128

ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN: IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG BALAI

Khairul Anwar Pulungan

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: khairulanwarpulungan@umsu.ac.id

Riva Ubar Harahap

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: riva.ubar@yahoo.com

Saprial Manurung

Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: ezzatnuha@gmail.com

ABSTRACT

- Purposes* – *The practice of management is not limited just to business, but also to governmental organizations. One of the implementations of government management is managing poverty alleviation programs. For this purpose, this study aims were to examine the policy of poverty reduction program in Tanjung Balai City, North Sumatera Province.*
- Methods* – *The approach in this research was applied using the quantitative paradigm. Data were compiled through interviews and questionnaires to stakeholders, including executives, legislators and community leaders. Analysis of research data using descriptive analysis technique with Analytical Hierarchy Process (AHP) method.*
- Findings* – *The research findings show that poverty alleviation in Tanjung Balai has the following priorities: First priority, investment field in the health industry. The second priority, social assistance. A third priority, empowerment of communities and small business.*
- Keywords* – *Policy, Poverty, Governmental Management.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan problematika sosial dalam kehidupan masyarakat yang tidak memiliki titik simpul akhir penyelesaian. Kemiskinan merupakan rentetan dari berbagai dampak dari aktivitas kehidupan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya. Peningkatan kemiskinan cenderung terjadi disebabkan ketidakadilan distribusi pendapatan, mengakibatkan terjadi marginalisasi pada masyarakat miskin, sehingga mereka senantiasa tidak mendapatkan kehidupan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemiskinan dianggap sebagai kekurangan pendapatan yang tidak terbatas dari setiap individu (Hatta, & Ali, 2013). *United Nations Development Programme (UNDP)*



mendefinisikan kemiskinan sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berlindung, ketidakmampuan berobat ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidakmampuan mendapatkan air bersih, ketidakberdayaan, serta tidak ada keterwakilan dan kebebasan (Mardiansyah, 2014).

Klasifikasi dan jenis-jenis kemiskinan dalam masyarakat pada umumnya terbagi menjadi: *Pertama*, kemiskinan absolut, yaitu keadaan yang mana pendapatan kasar bulanan tidak mencukupi untuk membeli keperluan minimum; *Kedua*, kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu kebutuhan dengan tingkat pendapatan lainnya; *Ketiga*, kemiskinan struktural yaitu kondisi di mana sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan; *Keempat*, kemiskinan kultural yaitu budaya yang membuat orang miskin, yang dalam antropologi kemiskinan sebagai adanya budaya miskin (Hamzah, 2012) .

Menurut laporan Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia telah mengalami peningkatan, yaitu mencapai 28,59 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2015a). Kondisi ini tentu menjadi tugas pemerintah untuk mengurai benang merah sebab-sebab terjadinya peningkatan dan usaha pemecahannya. Salah satu usaha dalam memecahkan masalah tersebut dapat dilakukan dengan empat cara kebijakan, yaitu (a) meningkatkan persediaan makanan, (b) menciptakan lapangan kerja, (c) menyediakan akses untuk menampung kritik terhadap layanan sosial, dan (d) meningkatkan aktifitas ekonomi lokal melalui dana hibah regional dan pengembangan sistem kredit (Urban Sector Development Unit Infrastructure Department East Asia and Pacific Region The World Bank, 2003).

Tingkat kemiskinan masyarakat di Kota Tanjung Balai tidak berbeda jauh dialami daerah-daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai, jumlah penduduk miskin telah mencapai 5.603 KK (Badan Pusat Statistik, 2015b). Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan bila dilihat dari potensi sumber daya alam dan posisi geografis Kota Tanjung Balai yang sangat strategis.

Dalam temuan awal, pemerintah Kota Tanjung Balai belum memiliki peranan yang lebih besar dalam usaha mengentaskan kemiskinan masyarakat Kota Tanjung Balai. Disamping itu kapasitas kelembagaan dan keuangan masih sangat terbatas. Bahkan sistem informasi kependudukan tidak memadai dan sangat buruk, sehingga membuat kebijakan program penanggulangan kemiskinan tidak maksimal dilakukan. Bahkan program yang disusun tidak secara substansial dalam memecahkan masalah kemiskinan. Dampaknya masyarakat merasakan pemerintah tidak memiliki peran maksimal dalam menjamin hak hidup layak bagi mereka.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka diperlukan suatu metode dalam penyusunan kebijakan program penanggulangan kemiskinan dengan menetapkan skala prioritas melalui pertimbangan pada aspek kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process*



(AHP) seperti yang digunakan di dalam penelitian yang bertujuan untuk melihat skala prioritas dalam usaha penanggulangan masyarakat miskin di Kota Tanjung Balai.

KAJIAN LITERATUR

Problematika kemiskinan merupakan problema berkepanjangan yang tidak dapat dipecahkan dalam satu simpul kebijakan, karena kemiskinan berhubungan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, budaya.

Kemiskinan merupakan suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Bappenas, 2012). Kemiskinan dalam makna yang lebih konkrit adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat, orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas (Ravallion, 2015).

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Tim Penyusun Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2012).

Hasil penelitian berkesimpulan bahwa penyebab kemiskinan adalah karena faktor ekonomi, sosial dan kultur (Syaparuddin, 2014). Dari sisi pemerintahan, disebabkan oleh keterbatasan fiskal pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan penduduk (Saragih, 2015)

Penanggulangan kemiskinan telah diaplikasi oleh berbagai negara di dunia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Namun berbagai kebijakan dalam penanggulangan sampai saat ini belum dapat menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat secara komprehensif. Hal ini disebabkan berbagai persoalan yang terjadi dalam suatu negara atau wilayah.

Dalam berbagai penelitian penanggulangan kemiskinan telah banyak pula dilakukan para ahli di Indonesia. Salah-satunya adalah solusi pengentasan kemiskinan melalui program karya mandiri atau program penanggulangan kemiskinan bersasaran. Penelitian tersebut memberi informasi bahwa melalui program karya mandiri, pendapatan peserta secara kolektif maupun individu mengalami peningkatan, jumlah peserta program kerja mandiri yang miskin menurun (Santosa, *et al*, 2008). Namun demikian, program pengentasan



kemiskinan tidak hanya menitikberatkan pada proses dan *outcome* (hasil) yakni semata-mata hanya berdasarkan pada berkurangnya jumlah angka kemiskinan, akan tetapi juga perlu dilihat bagaimana penduduk miskin tidak kembali menjadi miskin (Syaparuddin, 2014).

Penelitian pengentasan kemiskinan lainnya adalah mengkaji konsep dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam penanggulangan kemiskinan sebagai model pembangunan di Indonesia. Hasilnya diperlukan suatu susunan formula yang tepat agar penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara berkelanjutan, seperti perlunya perbaikan dalam kelembagaan/struktur masyarakat, prosedur kerja, serta budaya pada PNPM Mandiri Perdesaan. Tujuannya untuk menyempurnakan program pemberdayaan masyarakat dalam pendekatan partisipatif (Soesanta, 2013).

Walaupun pemerintah telah banyak melaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui program kemandirian masyarakat seperti di atas, banyak pula program yang gagal. Salah satu faktor penyebabnya adalah partisipasi dan apresiasi masyarakat masih kurang (Pertiwi, 2014). Faktor lainnya adalah keterbatasan fiskal pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan penduduk (Saragih, 2015).

Agar program pengentasan tidak mengalami kegagalan, penetapan skala prioritas diperlukan dalam program penanggulangan kemiskinan dengan melihat karakteristik kemiskinan pada masing-masing wilayah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan (Leggoegeni & Iyan, 2012) dan sebagainya.

Skala prioritas seperti di atas juga memerlukan dukungan strategi pencapaian. Strategi dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui: *Pertama* strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (*family-base policy*) rumah tangga miskin; *Kedua*, strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (*family centered integrated social assistance*); *Ketiga*, strategi penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas (pemberdayaan kelompok rumah tangga miskin); dan *Keempat*, strategi penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif (Rahman, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara kepada pemangku kepentingan dan juga masyarakat (pihak eksekutif, legislatif dan tokoh masyarakat).

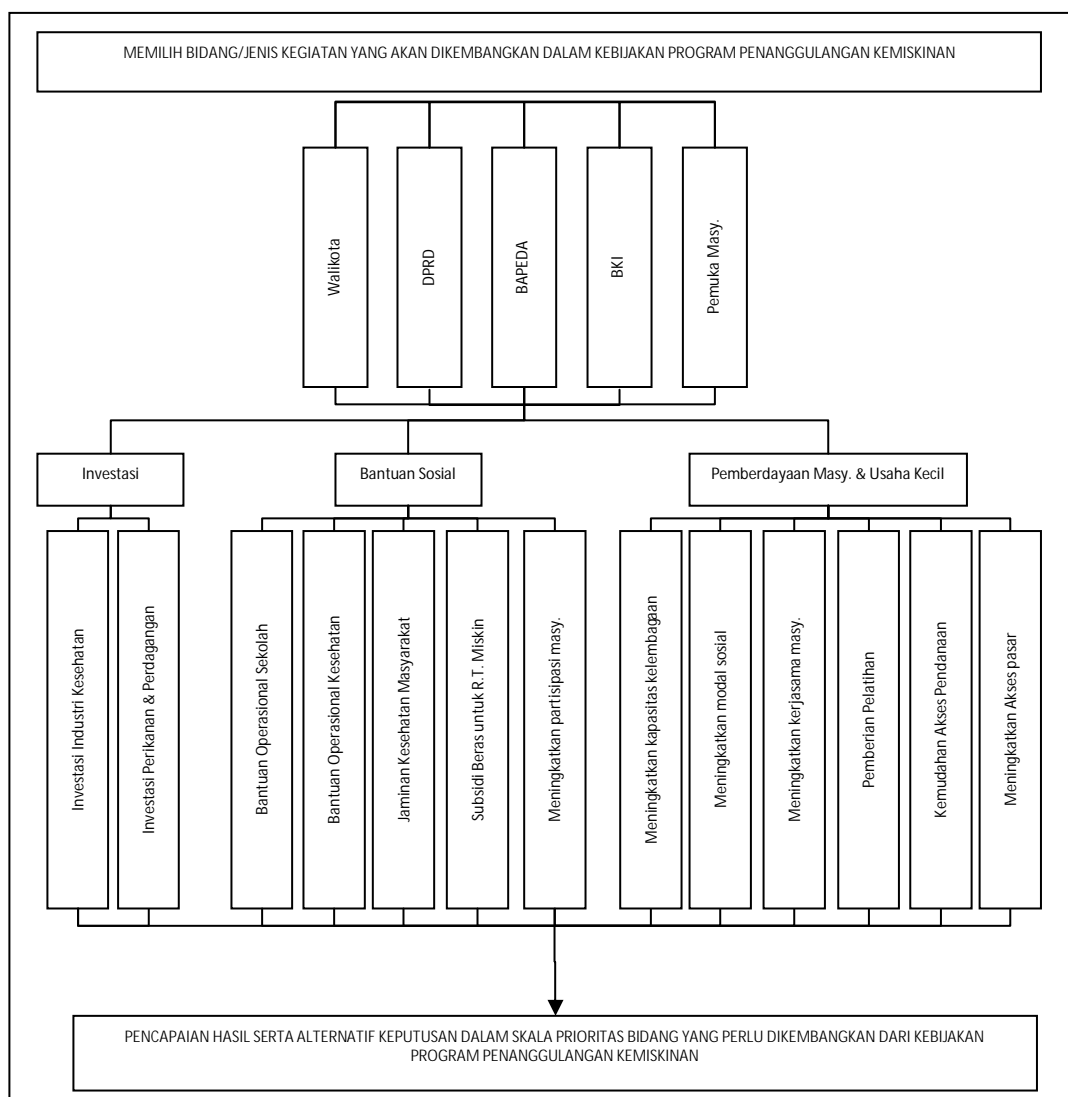
Disamping itu juga dilakukan studi dokumentasi dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* mengenai kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang telah disusun pemerintah Kota Tanjung Balai, khususnya Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) dan Badan pembangunan, Ekonomi dan Sosial Kota Tanjung Balai.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yaitu salah satu bentuk analisis dalam pengambilan kebijakan.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Penggunaan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) bertujuan untuk pengambilan kebijakan berdasarkan berbagai alternatif yang muncul dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjung Balai. Maka berbagai kebijakan program penanggulangan kemiskinan memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan sebagai alternatif, yaitu kegiatan investasi, bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.



Gambar 1 bidang/jenis kebijakan program penanggulangan kemiskinan

Ketiga alternatif tersebut (Gambar 1), akan ditentukan kembali skala prioritas dari masing-masing alternatif, antara lain: (1) Kegiatan investasi, alternatif yang akan dipilih sebagai skala prioritas adalah investasi dalam kesehatan dan investasi dalam usaha perikanan dan perdagangan; (2) Bantuan sosial, dipilih sebagai skala prioritas adalah bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat, dan subsidi beras untuk rumah tangga miskin; (3) Pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, alternatif yang akan dipilih sebagai skala prioritas adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan modal sosial, meningkatkan kerjasama masyarakat, pemberian pelatihan, kemudahan akses pendanaan, dan meningkatkan akses pasar.

Dari skala prioritas yang telah ditetapkan di atas, kriteria/faktor dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 rangkuman kriteria/faktor dan alternatif kebijakan dalam penentuan skala prioritas pengambilan keputusan menggunakan AHP

Keterangan	Kriteria/Faktor	Alternatif Kebijakan
Pemilihan bidang yang akan dikembangkan dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan	1.Politik (POL) 2.Ekonomi (EKO) 3.Sosial (SOS) 4.Keamanan (KEAM).	1. Investasi (INV) 2. Bantuan Sosial (BS) 3. Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kecil (PM&UK)
Pemilihan jenis investasi yang akan dikembangkan dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan	1.Kelembagaan Pemerintah (KP) 2.Sospol (SP) 3.Ekonomi Daerah (ED) 4.Sumber Daya Manusia (SDM) 5.Infrastruktur.	1. Industri kesehatan (IK) 2. Industri Perikanan dan perdagangan (IP&P)
Pemilihan jenis bantuan sosial yang akan dikembangkan dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.	1.Kelembagaan Pemerintah (KP) 2.Sospol (SP) 3.Ekonomi Daerah (ED) 4.Sumber Daya Manusia (SDM) 5.Infrastruktur.	1. Bantuan Operasional Sekolah(BOS) 2. Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) 3. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) 4. Subsidi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (SBRTM)
Pemilihan jenis pemberdayaan masyarakat dan Usaha Kecil yang akan dikembangkan dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan	1.Kelembagaan Pemerintah (KP) 2.Sospol (SP) 3.Ekonomi Daerah (ED) 4.Sumber Daya Manusia (SDM) 5.Infrastruktur.	1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (MPM) 2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan (MKK) 3. Meningkatkan Modal Sosial (MMS) 4. Meningkatkan Kerjasama Masyarakat (MKM) 5. Pemberian Pelatihan(PP) 6. Kemudahan Akses Pendanaan (KAP) 7. Meningkatkan Akses Pasar (MAP)

Keterangan	Kriteria/Faktor	Alternatif Kebijakan
Pemilihan jenis investasi industri kesehatan yang akan dikembangkan dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan	1. Bahan Baku 2. Sumber Daya Manusia 3. Teknologi 4. Infrastruktur	1. Rumah Sakit 2. Klinik Kesehatan 3. Praktek Dokter
Pemilihan jenis investasi industri perikanan dan perdagangan yang akan dikembangkan dari potensi pembukaan wilayah perbatasan	1. Iklim 2. Luas Lahan 3. Sumber Daya Manusia 4. Infrastruktur 5. Teknologi.	1. Usaha Pakaian Bekas 2. Alat Tangkap Nelayan 3. Galangan Kapal 4. Tempat Pelelangan Ikan

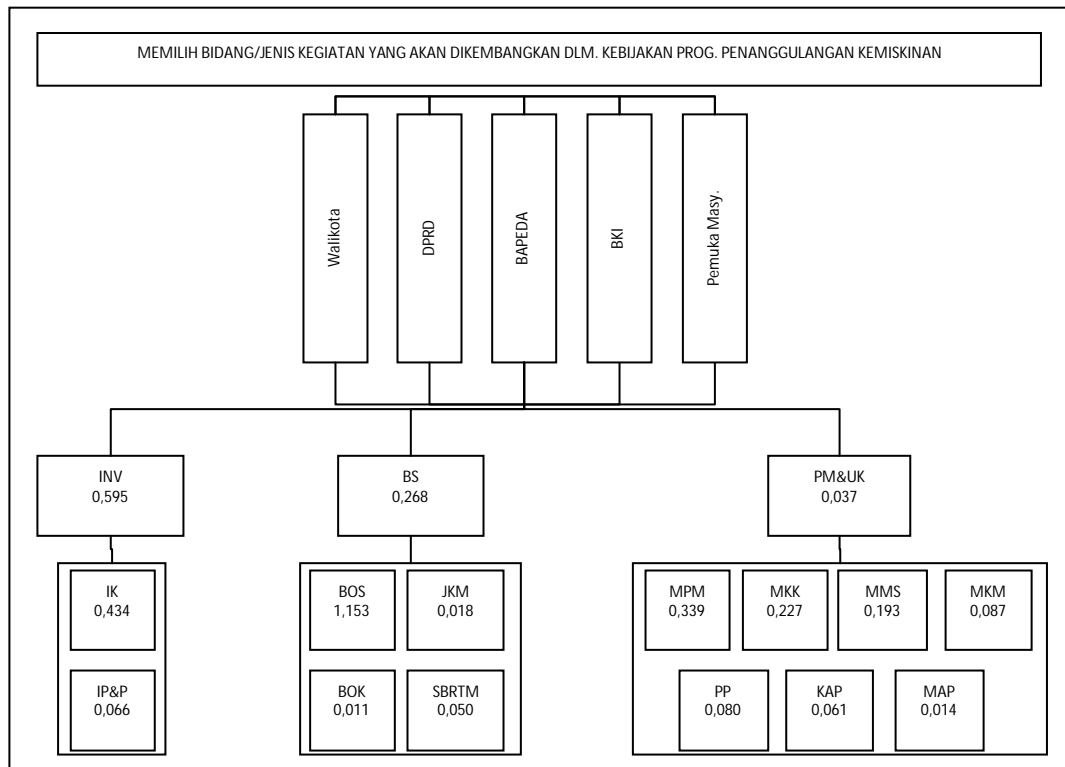
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Penetapan prioritas pilihan dalam menetapkan keputusan berdasarkan bidang kegiatan program penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjung Balai adalah dengan mengalikan nilai masing-masing faktor (politik, ekonomi, sosial dan keamanan) dengan nilai masing-masing bidang kegiatan (investasi, bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil). Hal ini dikemukakan di dalam Tabel 2.

Tabel 2 faktor & alternatif berdasarkan bidang kegiatan

	POL	EKO	SOS	KEAM
Bobot Faktor	0.601	0.276	0.091	0.032
INV	0.695	0.392	0.543	0.617
BS	0.254	0.344	0.188	0.115
PM & UK	0.051	0.015	0.02	0.018

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017



Gambar 2 pemilihan bidang/jenis dalam penetapan kebijakan program penanggulangan kemiskinan

Berdasarkan Gambar 2 dan Tabel 3, nilai prioritas untuk bidang investasi sebesar 0,595; bidang bantuan sosial sebesar 0,268; bidang pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil sebesar 0,037.



Tabel 3 nilai prioritas berdasarkan bidang kegiatan

	POL	EKO	SOS	KEAM	Prioritas
INV	0.418	0.108	0.049	0.020	0.595
BS	0.153	0.095	0.017	0.004	0.268
PM & UK	0.031	0.004	0.002	0.001	0.037

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penentuan skala prioritas yang perlu dikembangkan pertama kali di Kota Tanjung Balai dalam kebijakan program penanggulangan kemiskinan adalah pada bidang investasi.

Tabel 4 faktor & alternatif berdasarkan jenis investasi

	KP	SP	ED	SDM	IFS
Faktor Bobot	0.52	0.277	0.075	0.032	0.096
IK	0.435	0.426	0.439	0.446	0.446
IP & P	0.065	0.074	0.061	0.054	0.054

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Sementara itu dalam penetapan prioritas pilihan dalam menetapkan keputusan berdasarkan jenis investasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjung Balai dapat dikemukakan pada Tabel 4.

Tabel 5 nilai prioritas berdasarkan jenis investasi

	KP	SP	ED	SDM	IFS	Prioritas
IK	0.226	0.118	0.033	0.014	0.043	0.434
IP & P	0.034	0.020	0.005	0.002	0.005	0.066

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Gambar 2 dan Tabel 5 menunjukkan bahwa, nilai prioritas untuk investasi industri kesehatan sebesar 0,434; investasi industri perikanan dan perdagangan sebesar 0,066. Maka dengan demikian dapat disimpulkan, penentuan skala prioritas yang perlu dikembangkan di Kota Tanjung Balai dalam kebijakan program penanggulangan kemiskinan adalah pada investasi industri kesehatan.

Tabel 6 faktor & alternatif berdasarkan jenis sentra-sentra industri

	KP	SP	ED	SDM	IFS
Faktor Bobot	0.570	0.199	0.215	0.005	0.011
BOS	0.886	0.990	1.876	0.469	4.221
BOK	0.008	0.009	0.018	0.004	0.040
JKM	0.019	0.000	0.014	0.238	0.271
SBRTM	0.086	0.000	0.001	0.020	0.108

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Adapun penetapan prioritas pilihan dalam menetapkan keputusan berdasarkan jenis bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjung Balai dapat dikemukakan pada Tabel 6.

Tabel 7 nilai prioritas berdasarkan jenis sentra-sentra industri

	KP	SP	ED	SDM	IFS	Prioritas
BOS	0.505	0.197	0.403	0.002	0.046	1.153
BOK	0.005	0.002	0.004	0.000	0.000	0.011
JKM	0.011	0.000	0.003	0.001	0.003	0.018
SBRTM	0.049	0.000	0.000	0.000	0.001	0.050

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Tabel 7 menunjukkan bahwa, nilai prioritas untuk bantuan operasional sekolah sebesar 1,153; bantuan operasional kesehatan sebesar 0,011, jaminan kesehatan masyarakat sebesar 0,018, dan subsidi beras untuk rumah tangga miskin sebesar 0,050.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penentuan skala prioritas yang perlu dikembangkan di Kota Tanjung Balai dalam kebijakan program penanggulangan kemiskinan adalah bantuan operasional sekolah.

Tabel 8 faktor & alternatif berdasarkan jenis pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil

	KP	SP	ED	SDM	IFS
Faktor Bobot	0.570	0.199	0.215	0.005	0.011
MPM	0.274	0.485	0.366	0.456	0.464
MKK	0.212	0.141	0.347	0.234	0.224
MMS	0.259	0.110	0.103	0.113	0.113
MKM	0.091	0.106	0.057	0.070	0.094
PP	0.086	0.073	0.072	0.045	0.047
KAP	0.067	0.074	0.034	0.054	0.021
MAP	0.011	0.011	0.021	0.028	0.037

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berbagai alternatif/faktor yang menjadi skala prioritas berdasarkan faktor investasi, perdagangan dan pemberdayaan masyarakat. Maka penetapan prioritas pilihan dalam menetapkan keputusan dalam program penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjung Balai. Dikemukakan pada Tabel 8.

Tabel 9 nilai prioritas berdasarkan jenis pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil

	KP	SP	ED	SDM	IFS	Pioritas
MPM	0.156	0.097	0.079	0.002	0.005	0.339
MKK	0.121	0.028	0.075	0.001	0.002	0.227
MMS	0.148	0.022	0.022	0.001	0.001	0.193
MKM	0.052	0.021	0.012	0.000	0.001	0.087
PP	0.049	0.015	0.015	0.000	0.001	0.080
KAP	0.038	0.015	0.007	0.000	0.000	0.061
MAP	0.006	0.002	0.005	0.000	0.000	0.014

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Tabel 9 menunjukkan bahwa, nilai prioritas untuk hasil meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 0,339; meningkatkan kapasitas kelembagaan sebesar 0,227,

meningkatkan modal sosial sebesar 0,193, hasil meningkatkan kerjasama masyarakat sebesar 0,087, hasil pemberian pelatihan sebesar 0,080, hasil kemudahan akses pendanaan sebesar 0,061 dan hasil meningkatkan akses pasar sebesar 0,014.

Dengan demikian dapat disimpulkan, penentuan skala prioritas yang perlu dikembangkan di Kota Tanjung Balai dalam kebijakan program penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan analisa data AHP (*Analytical Hierarchy Process*) yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan. Dalam kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang menjadi skala prioritas pertama adalah dalam bidang investasi dengan skor 0,595. Adapun bidang investasi yang menjadi skala prioritas adalah investasi dalam industri kesehatan dengan skor 0,434.

Skala prioritas kedua adalah kegiatan pengembangan bantuan sosial dengan skor 0,268, adapun bantuan sosial yang lebih prioritas dikembangkan adalah dalam pemberian bantuan operasional sekolah dengan skor 1,153.

Skala prioritas ketiga adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil dengan skor 0,037. Sedangkan prioritas yang perlu dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dengan skor 0,339.

Diskusi

Masalah kemiskinan masyarakat tidak dapat dinafikan terjadi secara masif dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Usaha dalam mengentaskan kemiskinan menjadi kewajiban sebuah pemerintahan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Berbagai kebijakan melalui program penanggulangan kemiskinan dilakukan pemerintah khususnya pemerintah Kota Tanjung Balai. Diantara kebijakan program penanggulangan kemiskinan tersebut adalah dengan menetapkan berbagai skala prioritas untuk langsung diimplementasikan. Tujuannya masyarakat dapat merasakan secara langsung dari kebijakan tersebut.

Dari analisis data analisa data dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* seperti telah dibahas sebelumnya, program penanggulangan kemiskinan yang menjadi skala prioritas pertama di Tanjung Balai adalah dalam bidang investasi, bukan bidang bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. Investasi seperti itu merupakan suatu kegiatan penggunaan uang untuk menyediakan barang modal, dimana barang modal ini dimanfaatkan untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang (Arshanti dan Wirathi, 2015).

Investasi di Kota Tanjung Balai seperti di atas menjadi prioritas utama didukung oleh berbagai faktor kondisi: *pertama*, tersedianya sumber daya alam yang cukup melimpah





dengan luas lahan potensial yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal; *kedua*, sarana dan prasarana seperti jalan, tenaga listrik, air bersih, telekomunikasi dan informasi dalam tahap pembangunan dan penyelesaian; *ketiga*, kerjasama regional, Kota Tanjung Balai berada dekat laut Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Maka kerjasama regional dalam lingkup bilateral maupun multilateral sangat memberikan prospek cukup signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam analisis AHP lebih lanjut, bidang investasi yang menjadi skala prioritas adalah investasi industri kesehatan, skala prioritas kedua adalah kegiatan pengembangan bantuan sosial, dan skala prioritas ketiga adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.

Pertama, investasi industri kesehatan. Usaha mengurangi kemiskinan melalui investasi seperti di atas baik dari pemerintah maupun swasta dapat dijalankan melalui berbagai instrumen kebijakan, yaitu pengeluaran pemerintah untuk investasi untuk kesehatan. Investasi dari sektor swasta bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi yang bersumber dari dalam, yaitu tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, dan penerimaan devisa. Bahkan mengeksplorasi lebih jauh pemanfaatan dana zakat yang dialokasikan untuk kegiatan investasi dalam bentuk kegiatan produktif dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan (Yanah, 2014).

Kedua, investasi pengembangan bantuan sosial. Kebijakan program pengentasan kemiskinan pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi khususnya dalam kegiatan investasi. Namun perlu memperhatikan aspek sosial guna mendorong terjadinya perbaikan kondisi hidup masyarakat di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu aspek lain yang menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjung Balai dapat dilakukan dalam bentuk bantuan sosial.

Hasil temuan Mahaeni *et al* (2014) menyimpulkan bahwa bantuan sosial bagi masyarakat miskin memiliki manfaat positif dalam pengentasan kemiskinan. Adapun bentuk bantuan tersebut diantaranya bantuan raskin, dimana telah memberikan kontribusi dalam mengurangi pengeluaran biaya kebutuhan pokok, sedangkan bantuan bidang pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah dapat meringankan pengeluaran biaya untuk pendidikan (sekolah), adapun bantuan bidang kesehatan dapat mengurangi biaya untuk pengobatan dan meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat. Maka dengan demikian secara langsung memiliki efek positif dalam memperbaiki kehidupan masyarakat.

Ketiga, investasi pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. Kebijakan program penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan pada bidang/jenis pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. Meningkatnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam usaha memaksimalkan potensi yang mereka miliki akan menjadikan mereka lebih produktif dan memberikan peluang besar dalam memperbaiki kondisi hidup masyarakat miskin.

Dalam temuan penelitian Saragih (2015), kebijakan pengembangan usaha-usaha mikro dan usaha-usaha kecil untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan sangat rendah perlu

dikembangkan pemerintah, hal ini akan sangat membantu penduduk miskin untuk mandiri, dan meningkatkan penghasilan mereka yang pada gilirannya akan membantu untuk dapat bertahan hidup dan keluar dari garis kemiskinan.

Ras (2013) mengemukakan bahwa usaha mengurangi angka kemiskinan dapat dilakukan melalui strategi pemberdayaan kepada masyarakat miskin dalam bentuk pemberdayaan, dengan mengikutsertakan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai kepada evaluasi program. Tujuannya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Alawiyah (2016) mengungkapkan bahwa implementasi program percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan modal usaha kecil menengah (UKM) dan menyediakan tenaga ahli sebagai pengajar.

Berdasarkan temuan penelitian ini dan komparasi berbagai penelitian seperti di atas, maka kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjung Balai harus dapat disusun dengan sistem manajemen pemerintahan yang baik, terstruktur dan sistematis dengan merancang skala prioritas program dan kebijakan sebagai wujud dari fungsi perencanaan (*planning*), mengimplementasikan kebijakan (*do*), mengontrol, mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan (*check*) dan menindaklanjuti kebijakan (*action*).

PENUTUP

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa manajemen pemerintahan dalam penanggulangan masalah kemiskinan di Kota Tanjung Balai mempunyai prioritas sebagai berikut: *Prioritas pertama*, bidang investasi dalam industri kesehatan. *Prioritas kedua*, bantuan sosial. *Prioritas ketiga*, pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.

Dari kesimpulan di atas, maka ada beberapa rekomendasi yang diusulkan. *Pertama*, perlunya pemerintah pusat dan daerah melakukan sinkronisasi dalam usaha mempercepat pengentasan kemiskinan dengan memberikan berbagai kebijakan yang terstruktur dan dapat diimplementasikan masyarakat Kota Tanjung Balai. *Kedua*, perlunya sinkronisasi diantara instansi-instansi di Kota Tanjung Balai yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat kesejahteraan masyarakat, agar berbagai aktivitas yang dilakukan dapat memberikan dampak positif dalam penanggulangan kemiskinan. *Ketiga*, perlunya Pemerintah Kota Tanjung Balai lebih memperhatikan sistem kelembagaan, kondisi keamanan, dan kepastian hukum dalam memaksimalkan kegiatan investasi dan perdagangan. *Keempat*, perlunya kerjasama diantara pemerintah daerah, propinsi dan pusat dalam mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di masing-masing Kecamatan di wilayah Kota Tanjung Balai.



© LPPI AQLI
Jurnal Riset
Sains Manajemen
Vol. 1 No.2
Hlm. 115-128



© LPPI AQLI
Jurnal Riset
Sains Manajemen
Vol. 1 No.2
Hlm. 115-128

REFERENSI

- Arshanti, K. N., & Wirathi, I. G. A. P. (2015). Pengaruh investasi terhadap pengentasan kemiskinan melalui mediasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. *E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(5), 348-607.
- Alawiyah, R. (2016). Implementasi program percepatan penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 4(4), 4896-4910.
- Badan Pusat Statistik. (2015a). *Indonesia dalam angka 2015*. Jakarta: BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2015b). *Kota Tanjung Balai dalam angka 2015*. Jakarta: BPS Kota Tanjung Balai.
- Bappenas. (2012). *Rencana kerja pemerintah: Lampiran buku II peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Hamzah, A. (2012). Policy tackling the poorness and hunger in Indonesia: Reality and study. *Jurnal AKK*, 1(1), 48-55.
- Hatta, Z. A., & Ali, I. (2013). Poverty reduction policies in Malaysia: Trends, strategies and challenges. *Asian Culture and History*, 5(2), 48-56.
- Lenggogeni, S., & Iyan, R. Y. (2012). Analisis prioritas penanggulangan kemiskinan menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 3(7), 71-87.
- Mardiansyah, I. (2014). Evaluasi program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat: Studi kasus pada program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang. *Jurnal WIGA*, 4(1), 71-92.
- Mahaeni, A., Sudibia, I. K., & Wirathi, I. (2014). Evaluasi program-program pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, 10(1), 8-18.
- Pertiwi, S. Y. (2014). Model kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Pendecta: Research Law Journal*, 9(2), 212-225.
- Rahman, A. (2015). Analisis keunggulan kompetitif dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Darussalam*, 6(12), 13-26.
- Ravallion, M. (2015). On testing the scale sensitivity of poverty measures. *Economics Letters*, 137(1), 88-90.
- Ras, A. (2013). Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. *Jurnal Socius*, 15(1), 56-63.
- Santosa, A., Hidayat, D. G., & Indroyono, P. (2003). Evaluasi dampak program penanggulangan kemiskinan bersasaran di Provinsi D.I. Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 18(2), 1-8.
- Saragih, J. P. (2015). Analisis kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Transparansi*, 7(1), 16-35.
- Soesanta, P. E. (2013). Penanggulangan kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan. *Jurnal Bina Praja*, 5(2), 73-78.
- Syaparuddin (2014). Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, 16(1), 67-80.
- Tim Penyusun Komite Penanggulangan Kemiskinan (2012). *Strategi nasional penanggulangan kemiskinan (SNPK)*. Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan.

Urban Sector Development Unit Infrastructure Department East Asia and Pacific Region
The World Bank. (2003). *Kota-kota dalam transisi: Tinjauan sektor perkotaan pada era desentralisasi di Indonesia*. Dikutip 2 Nopember 2017, dari World Bank: [http://lnweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/2c4ea74c4d42fe8d852568b60074a864/f74ff2c94d277ba747256da6002eff80/\\$FILE/Citiesintransition-bhs.pdf](http://lnweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/2c4ea74c4d42fe8d852568b60074a864/f74ff2c94d277ba747256da6002eff80/$FILE/Citiesintransition-bhs.pdf)

Yanah (2014). Strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui sinergi antara bank syariah dan Baznas. *Jurnal Ekonomi*, 2(3), 1-33.



© LPP IAIN
Jurnal Riset
Sains Manajemen
Vol. 1 No.2
Hlm. 115-128